

**PERKEMBANGAN POLITIK KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2004 – 2015**

SKRIPSI

oleh

Werdo Sujatmiko

NIM : 06041281520067

Program Studi : Pendidikan Sejarah



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2019

**PERKEMBANGAN POLITIK KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2004 -2015**

SKRIPSI

Oleh

Werdo Sujatmiko

NIM: 06041281520067

Program Studi Pendidikan Sejarah


Telah diujikan dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Juli 2019

TIM PENGUJI

- 1. Ketua : Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd.**
- 2. Sekretaris : Drs. Alian Sair, M.Hum.**
- 3. Anggota : Adhitya Rol Asmi, M.Pd.**
- 4. Anggota : Drs. Supriyanto, M.Hum.**
- 5. Anggota : Dr. Hudaidah, M.Pd.**

A.n. Koordinator 





Indralaya, Juli 2019

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah



**Dr. Syarifuddin, M.Pd.
NIP. 198411302009121004**

**PERKEMBANGAN POLITIK KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2004 - 2015**

SKRIPSI

Oleh

Werdo Sujatmiko

NIM: 06041281520067

Program Studi Pendidikan Sejarah

Mengesahkan:

Pembimbing 1,
a.n koordinator



Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd.
NIP. 195603101986032005

Pembimbing 2,



Drs. Alian Sair, M.Hum.
NIP. 195803011986031004

Mengetahui:

**Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



Dr. Farida, M.Si.
NIP. 196009271987032002

**Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah**



Dr. Syarifuddin, M.Pd.
NIP. 198411302009121004

**PERKEMBANGAN POLITIK KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2004 - 2015**

SKRIPSI

Oleh

Werdo Sujatmiko

NIM: 06041281520067

Program Studi Pendidikan Sejarah

Disetujui,

**Pembimbing 1,
a.n Koor Prodi**



**Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd.
NIP. 195603101986032005**

Pembimbing 2,



**Drs. Alian Sair, M.Hum.
NIP. 195803011986031004**

Disahkan,

**a.n Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan
Universitas Sriwijaya
Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**Dr. Farida, M.Si.
NIP. 196009271987032002**

**PERKEMBANGAN POLITIK KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2004 - 2015**

SKRIPSI

Oleh

Werdo Sujatmiko

NIM: 06041281520067

Program Studi Pendidikan Sejarah

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana

Pembimbing 1,
a.n. Koorsproa



Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd.
NIP. 195603101986032005

Pembimbing 2,



Drs. Alian Sair, M.Hum.
NIP. 195803011986031004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah



Dr. Syarifuddin, M.Pd.
NIP. 198411302009121004

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Werdo Sujatmiko

NIM : 06041281520067

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Perkembangan Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2004 - 2015” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, adap elanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak mana pun.

Indralaya, 16 Juli 2019

Yang membuat pernyataan

Werdo Sujatmiko

NIM 06041281520067

PRAKATA

Skripsi dengan judul “Perkembangan Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2004 - 2015” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dalam mewujudkan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd. dan bapak Drs. Alian Sair, M.Hum. sebagai pembimbing, atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan FKIP Unsri Prof. Sofendi, M.A., Ph.D, Ketua Jurusan Pendidikan IPS ibu Dr. Farida, M.Si, Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah bapak Dr. Syarifuddin, M.Pd yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditunjukkan kepada bapak Adhitya Rol Asmi, M.Pd., bapak Drs. Supriyanto, M.Hum., dan ibu Dr. Hudaidah, M.Pd., anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi pendidikan sejarah dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Indralaya, 16 Juli 2019

Penulis,

Werdo Sujatmiko

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, ku persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku, ibu Jumini dan bapak Sugeng, saudariku Nunung Ainur Rohmah, dan keponakanku Andhika Putra Pratama dan Dicky Prasetyo yang telah memberikan dorongan semangat serta doa-doa yang tak pernah putus demi kelancaran studiku. Terima kasih dan sayangku kepada kalian.
- ❖ Kedua dosen pembimbingku, ibu Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd. dan bapak Drs. Alian Sair, M.Hum. yang telah memberikan nasihat, semangat, motivasi, dan tanpa kenal lelah dalam membimbing saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik.
- ❖ Kordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, Dr. Syarifuddin, M.Pd.
- ❖ Dosen program studi Pendidikan Sejarah, Dra. Yunani Hasan, M.Pd., Drs. Supriyanto, M.Hum., Drs. Alian Sair, M.Hum., Dr. Farida., M.Si., Dr. L. R. Retno Susanti. M.Hum., Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D., Dra. Sani Safitri, M.Si., Dra. Sri Kartika, Dr. Hudaidah, M.Pd., Dedi Irwanto, S.S., M.Hum., Dr. Syarifuddin, M.Pd., Adhitya Rol Asmi, M.Pd., Aulia Novemy Dhita, M.Pd. dan Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd., yang telah memberi ilmu dan nasihat yang bermanfaat.
- ❖ Admin Program Studi Pendidikan Sejarah, kak Agung Dwi Rizky, S.Pd. dan kak Reno Mardhotillah, S.Sos. yang telah membantu dan direpotkan dalam segala urusan semasa perkuliahan.
- ❖ Narasumberku yang sangat luar biasa, Drs. Soemarjono, Rizal Fahlevi, AP., M.Si., Kotam Komarita Nurdin, A.Md., Heriyanto Dahlan, S.H., dan Iskandar Anwar, S.E.
- ❖ Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Ir. H. Heri Amalindo, M.M., dan Ferdian Andreas Lacony, S.Kom., M.M.
- ❖ Orang-orang baik, om Indra Setia Haris, S.E, mbak Novia Kolopaking, A.Md., mbak Santri Juni Kartika, S.E., mbak Pirna, dan kak Hermansyah yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi.

- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan #2019Wisuda : Thahir, Sandra, Anas, Dedi, Roma, Rillo, Firwansyah, Merry, Nadia, Jeli, Iin, Riska, Via, Apri, Ika, Ellin, Kurniawati, Thiara, Rosa, dan Liza. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik : untuk masa depan.
- ❖ Teman-teman HIMAPES angkatan 2015 kelas Indralaya dan Palembang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- ❖ Teman-teman HIMAPALI Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- ❖ Keluarga besar FRA1LCRUSH_ di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada semoga silaturahmi kita tak pernah putus di dunia maya, dan semoga suatu saat nanti kita akan dipertemukan.
- ❖ Indralaya dan Palembang, saksi bisu perjalananku menjadi seorang sarjana.
- ❖ Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang menjadi inspirasiku.
- ❖ Almamaterku tercinta, Universitas Sriwijaya.
- ❖ Orang-orang baik yang kutemui selama hidupku.
- ❖ Orang-orang yang selalu bertanya “kapan wisuda ?”.
- ❖ Pembaca yang budiman.

Motto:

- ❖ **TERBENTUR, TERBENTUR, TERBENTUR : TERBENTUK !**
- *Tan Malaka*
- ❖ **Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik.**
- *Q.S Fussilat : 34*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN	vi
PRAKATA	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5.1 Ruang Lingkup Spasial.....	8
1.5.2 Ruang Lingkup Temporal.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Perkembangan.....	10
2.2 Pengertian Politik.....	10
2.2.1 Negara.....	11
2.2.2 Kekuasaan.....	11
2.2.3 Pengambilan Keputusan.....	11
2.2.4 Kebijakan Umum.....	12
2.2.5 Pembagian.....	12

2.3 Pengertian Otonomi Daerah.....	14
2.4 Pengertian Pemerintahan.....	17
2.5 Situasi dan Kondisi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.....	19
2.5.1 Geografis.....	19
2.5.2 Pemerintahan.....	19
2.5.3 Demografi.....	21
2.5.4 Sosial.....	23
2.5.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	24
BAB III METODOLOGI.....	25
3.1 Metode Penelitian.....	25
3.2 Langkah-Langkah Penelitian Sejarah.....	26
3.2.1 Heuristik.....	26
3.2.1.1 Data Primer.....	26
3.2.1.2 Data Sekunder.....	27
3.2.2 Kritik Sumber.....	28
3.2.2.1 Kritik Ekstern.....	28
3.2.2.2 Kritik Intern.....	29
3.2.3 Interpretasi.....	31
3.2.4 Historiografi.....	32
3.3 Pendekatan.....	33
3.3.1 Pendekatan Politik.....	34
3.3.2 Pendekatan Sosiologi.....	34
3.3.3 Pendekatan Ekonomi.....	34
3.3.4 Pendekatan Geografi.....	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1 Perkembangan Awal Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	36
4.1.1 Pembentukan FKKB-PALI (2004 - 2005).....	38
4.1.2 Pembentukan Dewan Presidium Pemekaran Kabupaten PALI	40

4.2 Perkembangan Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2004 - 2015	43
.....	43
4.2.1 Pengajuan di Tingkat Kabupaten dan Provinsi.....	43
4.2.2 Pengajuan di Tingkat Pemerintah Pusat.....	58
4.3 Perkembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Setelah Menjadi	
Kabupaten Tahun 2013 - 2015.....	60
4.3.1 Sambutan Masyarakat Pasca Pengesahan Kabupaten PALI.....	60
4.3.2 Perjalanan Awal Kabupaten PALI.....	61
4.3.3 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten PALI Tahun 2015.....	65
4.3.4 Tanggapan Masyarakat Mengenai Perkembangan Politik Kabupaten PALI	
Tahun 2004 – 2015.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Administrasi Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	19
Tabel 2.2	Jumlah Demografi sebelum menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.....	22
Tabel 2.3	Jumlah Demografi sesudah menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	22
Tabel 4.1	Daftar Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan 2014 – 2019.....	61
Tabel 4.2	Struktur Penjabat Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2013.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Usul Judul Skripsi.....	83
Lampiran 2 Surat Persetujuan Seminar Proposal.....	84
Lampiran 3 Halaman Pengesahan Seminar Proposal.....	85
Lampiran 4 Tabel Perbaikan Seminar Proposal.....	86
Lampiran 5 Bukti Perbaikan Seminar Proposal.....	87
Lampiran 6 Surat Persetujuan Seminar Hasil.....	88
Lampiran 7 Halaman Pengesahan Seminar Hasil.....	89
Lampiran 8 Tabel Perbaikan Seminar Hasil.....	90
Lampiran 9 Bukti Perbaikan Seminar Hasil.....	92
Lampiran 10 Halaman Persetujuan Sidang.....	93
Lampiran 11 Halaman Persetujuan Sidang.....	94
Lampiran 12 Tabel Perbaikan Sidang.....	95
Lampiran 13 Bukti Perbaikan Sidang.....	97
Lampiran 14 SK Pembimbing.....	93
Lampiran 15 SK Penelitian.....	95
Lampiran 16 Surat Balasan Penelitian	107
Lampiran 17 Kartu Bimbingan	117
Lampiran 18 Biodata Narasumber / Kajian Lapangan	122
Lampiran 19 Gambar dan Lampiran	130
Lampiran Skripsi	20 Izin Jilid 146

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui secara pasti bagaimana perkembangan politik yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (selanjutnya disebut Kabupaten PALI) Tahun 2004 – 2015, yang secara khusus membahas mengenai awal perjuangan pemekaran wilayah dari Kabupaten Muara Enim pada tahun 2004 hingga saat Pemilihan Kepala Daerah pertama kali pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan tanggal 1 April 2019 hingga 20 Mei 2019 di wilayah Kabupaten PALI dan Kota Palembang dengan menggunakan metode historis atau metode sejarah dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam studi literatur dan dengan teknik wawancara yang didapat dari para pelaku sejarah dari Dewan Presidium Pemekaran Kabupaten PALI, ditambah dengan para tokoh-tokoh penting di pemerintahan Kabupaten PALI. Dari penelitian yang telah dilakukan didapat sebuah hasil bahwa perjuangan pemekaran Kabupaten PALI sudah dilakukan pada awal tahun 2000, namun usaha tersebut baru resmi berlangsung ketika pendirian Dewan Presidium Pemekaran Kabupaten PALI pada tahun 2004. Usaha-usaha yang dilakukan Dewan Presidium Pemekaran Kabupaten PALI dilakukan dengan mengumpulkan dukungan dari masyarakat, melakukan negosiasi dengan pemerintah kabupaten, aksi turun ke jalan, persetujuan di tingkat provinsi, hingga disetujui oleh pemerintah pusat. Persetujuan inilah yang melahirkan kabupaten baru yang bernama Kabupaten PALI pada tahun 2013, hingga melakukan Pemilihan Kepala Daerah pertama kalinya pada tahun 2015.

Kata-kata Kunci: Politik, Otonomi Daerah, Kabupaten PALI, Pemilihan Kepala Daerah

Pembimbing 1

Dra. Yunani Hasan, M.Pd

NIP. 195603101986032005

Pembimbing 2

Dr. Aljan Sair, M.Hum

Drs. Aljan Sair, M.Hum

NIP. 195803011986031004

Mengetahui

Koordinator Program Studi

Dr. Syarifuddin, M.Pd

NIP. 198411302009121004

Abstract


This research purposes for knowing political development occurring in Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). In 2004-2015 discussed about the beginning struggling of the region expansion from Muara Enim in 2004 until first leader selesction in 2015. The research was conducted from April 1st 2019 until May 20th 2019 in PALI Regency and Palembang City by using historical method by collecting data in literature study and interview technique got from the offender's history from the council of the PALI Regency Expansion, important figures in Pali Region Government. From the research conducted reached the result that the struggling of PALI Region Expansion had conducted since 2000. However, the effort was going legitimately when the establishment of the council of the PALI Regency expansion in 2004. The efforts were doing by the council of the PALI region expansion by collecting support from society, doing negotiations with region government, demonstration action, agreement in province until was agreed by centre government. The agreement caused new region named PALI Regency in 2013 which growth until conducting first local leaders election in 2015.

Keywords : Political, Region Autonomy, PALI Regency, Local Leaders Election

Pembimbing 1

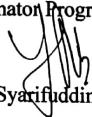

Dra. Yunani/Hasan, M.Pd
NIP. 195603101986032005

Pembimbing 2
a.n. Koordinator


Drs. Alian Sair, M.Hum.
NIP. 195803011986031004

Mengetahui

Koordinator Program Studi


Dr. Syarifuddin, M.Pd

NIP. 198411302009121004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Selatan merupakan suatu provinsi yang terdapat di Indonesia yang beribukota di Palembang. Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1° LS - 4° LS dan 102° BT - 106° BT, dengan luas daerah seluruhnya 8.7421.240 km² (Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka, 2017: 5), dan berbatasan dengan Jambi di sebelah utara, Bengkulu di sebelah barat, Bangka Belitung di sebelah timur, dan Lampung di sebelah selatan. Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 8.160.901 jiwa yang terdiri dari berbagai macam suku seperti Komering, Pasemah, Ogan, Palembang, Jawa, Tionghoa, Bugis, Minang, Aceh, Batak, dan masih banyak lagi. Mayoritas penduduk Sumatera Selatan memeluk agama Islam, dengan sebagian kecil lainnya memeluk agama Nasrani, Buddha, Konghucu, serta Hindu (Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka, 2017: 40). Dilihat dari topografinya, wilayah Sumatera Selatan merupakan wilayah yang berupa rawa-rawa dan hutan bakau disebelah pantai timur Sumatera, lalu di bagian tengah merupakan wilayah dataran rendah, hingga ke bagian barat yang merupakan daerah dataran tinggi dimana daerah tersebut dilalui oleh Bukit Barisan, sehingga terdapat beberapa gunung seperti Gunung Dempo (3159 mdpl), Gunung Patah (1107 mdpl), dan bukit-bukit kecil lainnya. Sumatera Selatan juga dilalui oleh sungai sebanyak 9 sungai dimana sering dikenal sebagai *Batanghari Sembilan*, yang terdiri atas Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Rupit, Sungai Kelingi, Sungai Rawas, Sungai Lakitan, dan Sungai Lalan yang merupakan anak dari Sungai Musi dan bermuara ke Selat Bangka. Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dan menjadikannya sebagai salah satu lumbung kekayaan alam

nasional. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya kekayaan alam dari sektor pertambangan khususnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, dari sektor perkebunan seperti karet, kelapa sawit, dan tanaman industri lainnya, dan dari sektor pertanian seperti padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

Pemberlakuan sistem otonomi daerah pada tahun 2000, memberikan suatu kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengelola apa yang terkandung di daerahnya sendiri. Hal tersebut menyebabkan sektor sosial dan ekonomi masyarakat daerah perlahan mulai menggeliat. Namun, pada pelaksanaannya sistem otonomi daerah masih mendapat pengawasan dari pusat agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari apa yang sudah direncanakan.

Supaya dapat melaksanakan tugas otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian, *pertama* manusia pelaksananya harus baik yang merupakan faktor esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, *kedua* keuangan yang baik berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku, *ketiga* peralatan yang cukup dan baik maksudnya setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah, dan *keempat* organisasi yang baik maksudnya satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya, dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan tertentu (Kaho, 2007: 66-69).

Berdasarkan konsep otonomi daerah pada tahun 2000 dimana setiap daerah (khususnya provinsi/kabupaten) berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri, maka berbagai tempat di daerah terus mengalami berbagai banyak kemajuan-kemajuan. Khususnya di Sumatera Selatan merupakan suatu provinsi yang mengalami perkembangan yang pesat. Sebelum dilakukan peraturan otonomi daerah, Sumatera Selatan hanya terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kotamadya. Masing-masing wilayah memiliki wilayah yang luas, sehingga terjadi ketidakmerataan dalam hal pembangunan. Seiring dengan berjalannya waktu dan dilaksanakannya otonomi daerah, maka dilakukan pemekaran wilayah seperti contoh Kabupaten Musi Banyuasin yang dimekarkan menjadi 2 kabupaten, Kabupaten OKU yang dimekarkan

menjadi 3 kabupaten, Kabupaten Lahat, Muara Enim, dan Musi Rawas yang dimekarkan menjadi masing-masing 2 kabupaten dan 1 kota (untuk hasil pemekaran Kabupaten Muara Enim termasuk juga termasuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir). Pada masa kini, setelah dilaksanakannya otonomi daerah Sumatera Selatan memiliki 13 kabupaten, 4 kotamadya, 232 kecamatan, 377 kelurahan, dan 2.859 desa (Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka, 2017: 23).

Mengenai tata cara pembentukan daerah baru, terdapat beberapa indikator pengujian pembentukan yang meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif yaitu adanya persetujuan dari DPRD tingkat kabupaten, DPRD tingkat provinsi, dan gubernur setempat. Syarat teknis meliputi faktor ekonomi, potensi daerah, sosial politik, kependudukan, dan luas daerah. Syarat fisik yaitu setidaknya paling sedikit memiliki 5 kecamatan agar dapat membentuk 1 kabupaten sendiri (Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007).

Otonomi daerah menjanjikan perubahan bagi eksistensi lokal. Ia dipercaya mendekatkan negara kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat lokal, dan memperkuat akuntabilitas lokal. Semua praktik politik dalam konteks otonomi daerah lebih banyak menguntungkan elit politik lokal. Setelah pembentukan daerah baru berhasil dilakukan, maka untuk selanjutnya ialah mengisi unsur pemerintahan agar kehidupan daerah baru tersebut dapat berjalan sebagai mana mestinya. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah pada awalnya ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri, yang nantinya akan menjabat selama beberapa tahun hingga dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum untuk mengisi unsur pemerintahan pada bidang eksekutif dan legislatif daerah.

Khusus yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, terjadi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Abab, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, dan Kecamatan Tanah Abang adalah masalah terlalu jauhnya rentang kendali ke pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Keinginan untuk membentuk kabupaten tersendiri juga didasari oleh 2 hal pokok, yaitu keinginan dalam pemerataan pembangunan dan adanya potensi sumber daya alam

yang cukup luas dan menjadi nilai tambah yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi sumber dana bagi pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Undang-Undang No 7 Tahun 2013). Selain itu juga, muncul gejolak-gejolak politik dengan hadirnya tokoh-tokoh daerah yang memainkan peran dalam usaha pembentukan wilayah kabupaten baru lepas dari wilayah Kabupaten Muara Enim yaitu meliputi 5 wilayah kecamatan yang termasuk dalam cakupan tersebut, yang menamakan diri sebagai Penukal Abab Lematang Ilir.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan daerah hasil pemekaran dari

Kabupaten Muara Enim, yang memiliki luas sebesar 1.840 km^2 (Kabupaten PALI dalam Angka, 2018: 3) dan jumlah penduduk sebanyak 184.671 jiwa (Kabupaten PALI dalam Angka, 2018: 63). Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki potensi kekayaan alam seperti karet, kelapa sawit, minyak bumi, batubara, dan gas alam. Pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Perkembangan politik yang dimaksud yaitu yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai pada saat terjadi semenjak dari awal rencana pembentukan kabupaten, yang melibatkan beberapa tokoh yang berasal dari kalangan partai, golongan intelektual (terutama putra daerah yang memiliki kedudukan baik di daerah maupun di luar daerah), dan masyarakat yang saling bahu-membahu hingga setelah berdirinya kabupaten tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Muara Enim. Lalu mulai masuknya partai-partai politik, yang nantinya akan maju pada pemilihan umum dan berkoalisi dalam mengusung calon kepala daerah untuk menyusun pemerintahan.

Kronologi perjalanan usaha masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bermula pada penghujung tahun 2003, muncul wacana pemekaran kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Muara Enim. Hal ini kemudian didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat dari kecamatan Talang Ubi, Penukal Abab, Penukal Utara, dan Tanah Abang. Berbagai tokoh-tokoh

masyarakat berkeliling mencari dukungan di kecamatan-kecamatan terkait yang menghasilkan kesepakatan semua komponen masyarakat agar mendesak segera dibentuknya daerah otonomi baru. Selanjutnya, pertemuan diadakan di beberapa tempat seperti Kampus Perguruan Tinggi Serasan, Muara Enim, kediaman H. Anwar Mahakil, S.H. di Jalan Angkatan 45 Palembang dan Desa Mangku Negara, serta di Jalan Benakat Kecamatan Talang Ubi. Hingga pada bulan Mei 2004 di kampus Perguruan Tinggi Serasan diadakan pertemuan untuk mendesak para Kepala Desa, BPRD, Organisasi Massa, LSM, dan perwakilan Partai Politik serta komponen terkait lainnya untuk segera menyampaikan dukungan secara tertulis. Hingga akhirnya terbentuknya Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang diketuai oleh H. Anwar Mahakil, S.H. Dewan Presidium Pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki beberapa bidang, yaitu Birgjen (Purn) Drs. H. Ibrahim Saleh, Brigjen Pol (Purn) Drs. H. Paristewa, dan H. Nang Ali Solichin, SH sebagai penasehat, H. Amri Ahmad, S.H, sebagai sekretaris umum, H. Ibrahim Machbor sebagai ketua bidang Humas, Drs. H. Ali Zaman M. Noor sebagai ketua bidang Kaderisasi, Ir. Yulius Caesar sebagai ketua bidang Perencanaan, Drs. H. Imron Usmar sebagai ketua bidang Organisasi (Sadewo, 2014: 175-179), dan dianggotai oleh beberapa tokoh masyarakat, politikus, golongan intelektual, dan kepala desa dari 5 kecamatan yang berada di daerah persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Perjalanan dalam perjuangan membentuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami kesulitan akibat terjadinya permasalahan-permasalahan hingga memakan kurun waktu 9 tahun lamanya, hingga pada tanggal 14 Desember 2012 diadakan sidang paripurna Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri yang menghasilkan kesepakatan yaitu pengesahan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, lalu pada 11 Januari 2013 dikeluarkan UU No. 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Atas ditetapkannya pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, muncul gejolak politik dimana masyarakat menginginkan kepemimpinan yang dipegang oleh putera daerah. Muncul beberapa tokoh yang digadang-gadang sebagai bakal calon,

baik itu dari kalangan intelektual, politikus, hingga swasta. Hingga akhirnya pada tanggal 22 April 2013 dilantik Ir. H. Heri Amalindo, M.M (eks Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 - 2013) sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penunjukkan Ir. H. Heri Amalindo, M.M. berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah beliau berasal dari desa Air Itam, Kecamatan Penukal. Sehingga beliau merupakan putra daerah asli. Selain itu juga beliau memiliki latar belakang karir yang baik sehingga dapat dipercaya untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang belum memiliki fasilitas pelayanan publik yang memadai.

Pada perjalanannya, gejolak perpolitikan berlanjut pada tampuk kepemimpinan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah mengalami pergantian sebanyak beberapa kali. Dimulai dari dilantiknya Ir. H. Heri Amalindo, M.M. sebagai penjabat bupati pada 22 April 2013, lalu pada 22 April 2015 jabatan tersebut digantikan oleh Drs. H. Apriyadi, M.Si (eks Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan) sebagai *caretaker*, dikarenakan Ir. H. Heri Amalindo M.M. maju dalam Pilkada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015 yang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati – wakil bupati, yaitu Ir. H. Heri Amalindo, M.M. – Ferdian Andreas Lacony, S.Kom., M.M. (HAFAL), Sukarman – Almarizan (SUKA), dan Eftiyani – Mukhtar Jayadi (YAMU) yang dimenangkan oleh pasangan Ir. H. Heri Amalindo, M.M. – Ferdian Andreas Lacony, S.Kom., M.M. sebagai bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2015 – 2020 yang didukung oleh koalisi partai yaitu Golkar, PDIP, PKS, Nasdem, PBB, PAN, Demokrat, dan PKPI dengan perolehan 75,15% suara.

Keberhasilan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir maka tercapainya cita-cita otonomi daerah yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang pesat, dengan diadakannya pembangunan-pembangunan di berbagai wilayah. Hal ini tak lepas dari peran para tokoh masyarakat, politisi, tokoh intelektual, kepala desa se-kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir dengan dukungan seluruh masyarakat dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selama hampir 9 tahun lamanya, hingga terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2013. Dan hingga pada tahun 2015, aspek politik mengalami perkembangan di kehidupan masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan memberikan hak politiknya dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan melihat bagaimana perkembangan politik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari digagasnya pembentukan presidium hingga pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya pada tahun 2015. Adapun judul pada penelitian ini adalah **“Perkembangan Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2004 – 2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian “Perkembangan Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2004 – 2015” adalah :

1. Bagaimana perkembangan awal pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ?
2. Bagaimana perkembangan politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2004- 2015 ?
3. Bagaimana perkembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah menjadi kabupaten pada tahun 2013 – 2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Perkembangan awal pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2. Perkembangan politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2004 – 2015
3. Perkembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah menjadi kabupaten pada tahun 2013 - 2015

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat peneliti mengadakan penelitian mengenai masalah ini adalah:

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai sejarah lokal Sumatera Selatan.

2. Sebagai bahan studi dan rujukan bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai masalah ini dan melakukan penelitian lanjutan.
3. Menambahkan dan melengkapi data bagi lembaga pemerintahan daerah
4. Sebagai bahan masukkan sekaligus pertimbangan bagi pemerintah daerah yang mengatur segala kebijakan yang berlaku di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan kesalahan dalam penguraian masalah yang akan diteliti dan lebih sistematis, maka perlu diadakan suatu pembatasan dalam ruang lingkup penelitian masalah. Oleh karena itu peneliti membatasi ruang lingkup masalah yaitu :

1.5.1 Ruang Lingkup Spasial

Skup Spasial dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pembatasan wilayah yang akan menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini untuk wilayahnya adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

1.5.2 Ruang Lingkup Temporal

Skup Temporal dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pembatasan kurun waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini diambil kurun waktu tahun 2004 – 2015. Pembatasan waktu ini mengambil tahun terbentuknya Dewan Presidium Persiapan Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan SK Bupati Muara Enim nomor 508/KPTS/III/2007 yang menyetujui rencana pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan pengesahan Dewan Presidium Pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang digagas pada tahun 2004. Serta waktu terkini yaitu pada tahun 2015, yang mana sudah dilaksanakan pemilihan kepala daerah pertama kalinya secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2013. *Profil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2013*. Talang Ubi: Bappeda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Basri, Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta : Indie Buku Corner
- Bayo, Longgina Novadona. dkk. 2018. *Rezim Lokal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Boonlue, Nattapong. 2015. Local Politics and Democracy in Thailand: 2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic Proceeding. *Procedia Economics and Finance* Vol. 23 (2015), 846 – 849.

[https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00531-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00531-6)

- Bupati Kabupaten Muara Enim. 9 Mei 2007. *Keputusan No. 508 / KPTS / III tentang Pembagian Wilayah Kabupaten Muara Enim terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Muara Enim : Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim
- Bupati Kabupaten Muara Enim. 11 Juni 2007. *Keputusan No. 610 / KPTS / III tentang Penentuan Lokasi Calon Ibukota Calon Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Muara Enim : Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim
- Budiardjo, Miriam. dkk. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- DetikNews, 5 Februari 2007, *Fraksi di DPRD Sumsel Dukung Pemekaran Kabupaten Muara Enim*, <https://news.detik.com/berita/738432/7-fraksi-di-dprd-sumsel-dukung-pemekaran-kabupaten-muaraenim>, diakses 30 April 2019
- DetikNews, 3 Februari 2009, *Kronologi Demo Anarkis & Meninggalnya Ketua DPRD Sumut*, <https://news.detik.com/berita/d-1079033/kronologi-demo-anarkis--meninggalnya-ketua-dprd-sumut>, diakses 1 Mei 2019
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim. 22 Desember 2006. *Undang-Undang No. 6 tentang Persetujuan terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Muara Enim : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim. 23 Mei 2007. *Undang-Undang No. 12 tentang Persetujuan Pemberian Pembiayaan Operasional Persiapan dan Pelaksanaan Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Muara Enim : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim. 30 Juni 2007. *Undang-Undang No. 08 tentang Persetujuan Penentuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Muara Enim : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 20 Juni 2007. *Keputusan No. 11 tentang Dukungan dan Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 15 Agustus 2008. *Bagian Tata Usaha Ketua DPR RI : Lembar Disposisi No. Agenda 3425 / DPR-RI / VIII tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten / Kota / Provinsi*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 10 Desember 2007. *Undang-Undang No. 78 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 11 Januari 2013. *Undang-Undang No. 7 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 12 Agustus 2008. *Pendapat Pimpinan Komisi II DPR RI Terhadap Surat Presiden No. R-50 / Pres / 8*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Dewan Presidium Pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 8 Mei 2009. *Kronologis Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Palembang : Dewan Presidium Pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Dewan Presidium Pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. ____ . *Rencana Pemekaran Kabupaten Muara Enim Menjadi Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI*. Talang Ubi. ____

Faguet, Jean-Paul. 2014. Decentralization and Governance. *World Development* Vol. 53 (2014), 2 – 13.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>

- Forum Komunikasi Keluarga Besar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Januari 2005. *Rencana Kecamatan Dalam Kabupaten Pemekaran Muara Enim*. Gelumbang
- Gelagat Sumsel, 17 Februari 2016, *Heri Amalindo – Ferdian Resmi Jabat Bupati dan Wakil Bupati PALL*, <http://gelagatsumsel.com/berita-2771-heri-amalindoferdian-resmi-jabat-bupati-dan-wakil-bupati-pali.html>, diakses 5 Mei 2019
- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. 20 Juni 2007. *Keputusan No. 390 / KPTS / I tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Hadi, Kisno. 2010. Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal Politika Universitas Diponegoro*, Vol 1 No 2, 5-18. <https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.5-18>
- Hasjimzum, Yusnani. 2014. Model Demokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Otonomi Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Reformasi). *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman* Vol. 14 No. 3 (2014), 445 – 447. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.310>
- Hisyam, Djihad. 2004. Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan. *Jurnal Efisiensi Kajian Ilmu Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta* Vol. 4 No. 1 (2004), 23 – 32. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v4i1.3803>
- Isjwara, F. 1999. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Putera Bardin
- Jamaludin. 2015. Euforia Otonomi Daerah dalam Bingkai Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri* Vol. 1 No. 11 (2015), 66 – 78. <https://doi.org/10.32503/diversi.v1i1.128>
- Kabupaten Muara Enim dalam Angka 2004*. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Muara Enim dalam Angka 2005. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Muara Enim dalam Angka 2007. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Muara Enim dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistik

Kabupaten Muara Enim dalam Angka 2009. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Muara Enim dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Muara Enim dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Angka 2013. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Angka 2015. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik

Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*.
Jakarta: Rajagrafindo Persada

Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Kisno, Hadi. 2010. Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional dalam Konteks
Otonomi Daerah. *Jurnal Politika Ilmu Politik Pascasarjana Universitas
Diponegoro* Vol.1 No. 2 (2010), 1 – 14.
<https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.5-18>

Kis-Katos, Krisztina. Bambang Suharnoko Sjahrir. 2017. The impact of fiscal and
political decentralization on local public investment in Indonesia, *Journal of
Comparative Economics* (2017), 2 – 52.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003>

Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana

Kusriyah, Sri. 2016. Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif
Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum
Universitas Islam Sultan Agung* Vol. 3 No. 1 (2016), 1 – 11.
<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1339>

Lorenz, Chris. 2015. History : Theories and Methods. *International Encyclopedia of
the Social & Behavioral Sciences*, 2nd edition, Vol. 11 (2015), 131 – 137.
<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.62142-6>

Natalia, A. 2015. Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Tapis UIN Raden Inten*, 11(1) (2002), 45-66.
<https://doi.org/10.24042/tapis.v11i1.841>

Noviawati, Evi. 2016. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 4 No 1 (2016), 47 – 61.

<http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.410>

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo

Prihatin, Eko Sabar. 2014. Politik Hukum Otonomi Daerah tentang Pemilukada. *Masalah – Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Jilid 4 No. 1 (2014), 49 – 56.

<https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.49-56>

Priyadi, Sugeng. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik

Rasaili, Wilda. 2016. Budaya Politik dan Kualitas Demokrasi dalam Pilkada 2015 – 2020 (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah serentak pertama di Indonesia).

Jurnal Aristo Universitas Muhammadiyah Ponorogo Vol. 4 No. 2 (2016), 1 – 13.

<http://dx.doi.org/10.24269/ars.v4i2.185>

Rochmiatun, Endang. 2013. *Kedudukan Sejarah di Tengah Ilmu-Ilmu Lain*. Palembang: UIN Raden Fatah

Sair, Alian. Dedi Irwanto. 2014. *Metodologi dan Historiografi Sejarah : Cara Cepat Menulis Sejarah*. Yogyakarta: Eja_Publisher

Sadewo, Joko. M. Ikhsan Mustaqiem. 2014. *H. Anwar Mahakil : Jejak Langkah Pengabdian*. Mangku Negara: PALI Intermedia

Schmidt, Siegfried J. 2001. Making stories about story-making, or why we need his-
and herstories: An approach towards a constructivist historiography.
Poetics Vol. 28 (2001), 455 – 462.

[https://doi.org/10.1016/S0304-422X\(00\)00036-X](https://doi.org/10.1016/S0304-422X(00)00036-X)

Sheehan, James J. 2015. Political History: History of Politics. *International
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd edition, Vol. 18
(2015), 380 – 385.

<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.62124-4>

Sjahrir, Bambang Suharnoko. et al. 2013. Political budget cycles in Indonesia at the
district level. *Economics Letters* Vol. 120 (2013), 342–345.

<https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007>

Sjahrir, Bambang Suharnoko. et al. 2014. Administrative Overspending in Indonesian
Districts: The Role of Local Politics. *World Development* Vol. 59, (2014),
166–183.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.008>

Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada

Sulaeman, Affan. 2015. Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah.
Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia, ISSN 2442-5958 Vol. 69
(2002), 12 – 24.

<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857>

- Suparlan, Parsudi. 2002. Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Jurnal Antropologi Indonesia Universitas Indonesia* Vol. 69 (2002), 98 – 105.
<https://doi.org/10.7454/ai.v0i69.3448>
- Surat Bupati Kabupaten Muara Enim kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia cq. Komisi II. 31 Desember 2008. *Surat No.135/ 1916 / I tentang Kelengkapan Persyaratan Administrasi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Muara Enim : Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim
- Surat Bupati Kabupaten Muara Enim kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. 13 April 2009. *Surat No. 135 / 449 / I tentang Kelengkapan Usul Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Muara Enim : Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim
- Surat Bupati Kabupaten Muara Enim kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. 13 April 2009. *Surat No. 135 / 449 / I tentang Kelengkapan Usul Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Muara Enim : Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim
- Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. 17 November 2008. *Surat No. LG.01.01 / 8249 / DPR-RI / XI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara dan Penukal Abab Lematang Ilir*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia. 16 Juni 2008. *Surat No. LG.01.01 / 4483 / DPR-RI / VI tentang Usulan DPR RI mengenai 17 Rancangan Undang - Undang tentang Pembentukan Kabupaten / Kota / Provinsi*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Bupati Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas. 21 Januari 2009. *Surat No. 135 / 0150 / I tentang Kelengkapan Usul Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Palembang : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Bupati Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas. 31 Maret 2009. *Surat No. 135 / 0916 / I tentang Kelengkapan*

Usul Pemekaran Calon Kabupaten Musi Rawas Utara dan Calon Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Palembang : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 22 Juni 2007. *Surat No. 136 / 2761 / I tentang Usul Pemekaran Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan.* Palembang : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua Panitia AdHoc I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 22 Juni 2007. *Surat No. 136 / 2762 / I tentang Usul Pemekaran Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan.* Palembang : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 22 Juni 2007. *Surat No. 136 / 2760 / I tentang Usul Pemekaran Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan.* Palembang : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 21 Januari 2008. *Surat No. 136 / 0091 / I tentang Melengkapi berkas Usul Pemekaran Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan.* Palembang : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia. 7 Agustus 2008. *Surat No. 135 / 2293 / SJ tentang 17 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten / Kota / Provinsi.* Jakarta : Sekretaris Kabinet

Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 16 Juli 2008. *Surat No. ____ / M.Sesneg / D4 / 07 tentang 17 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten / Kota / Provinsi.* Jakarta : Sekretaris Kabinet

Surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 12 Agustus 2008. *Surat No. R-50 / Pres / 8 tentang 17 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten / Kota / Provinsi.* Jakarta : Sekretaris Presiden

Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama

Telegram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat. 3 Februari 2009. *Telegram No. T.094 / 204 / OTDA*. Jakarta : Pusat Data Informasi, Komunikasi, dan Telkom Departemen Dalam Negeri

Tribunnews, 16 Desember 2012. *Warga Sambut Gembira Perwakilan PALI*. <http://palembang.tribunnews.com/2012/12/16/warga-sambut-gembira-perwakilan-pali>, diakses 3 Mei 2019

Tribunnews, 22 Desember 2015. *Pasangan HAFAL Pemenang Pilkada PALI*. <http://palembang.tribunnews.com/2015/12/22/pasangan-hafal-pemenang-pilkada-pali>, diakses 5 Mei 2019

Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Yusuf, Iwan Awaluddin. 2011. Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada* Vol. 14 No. 3 (2011), 297 – 315.

<https://doi.org/10.22146/jsp.10930>